



KEBIJAKAN THE GREAT FIREWALL OF CHINA PERIODE 2020-2023: ANALISIS POLIHEURISTIK

Sabrina Meliani Sukma¹, Evlynda Abigael², Putri Andjani Nur Afifah³, Rizka Kharisma⁴

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Email:

ssabrinamelianisukma@gmail.com

Abstrak. Artikel ini menjelaskan tentang kebijakan The Great Firewall of China dalam mengatasi hegemoni barat serta faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini yang dikaji melalui analisis poliheuristik. Jumlah pengguna internet yang besar di Tiongkok dapat berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan negara apabila dimasuki hegemoni dan ideologi barat. Teknologi dan internet adalah kunci utama dalam mendorong proses globalisasi. Dengan adanya internet membuat masyarakat internasional memiliki akses yang mudah dalam memperluas pengetahuan, komunikasi, interaksi dengan orang yang jauh. Melalui kebijakan The Great Firewall of China (GFW) pemerintah Tiongkok melakukan pengendalian terhadap internet dengan cara penyensoran. Sistem kebijakan GFW terus mengalami penguatan khususnya dalam melindungi keamanan nasional Tiongkok di era digital saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Poliheuristik dan Proteksionisme Digital untuk menganalisis bagaimana kebijakan GFW diterapkan untuk mengatasi hegemoni media barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer berupa studi kepustakaan berupa artikel, tesis, portal berita online, buku. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa dari awal mula munculnya internet pada tahun 1990-an, pemerintah Tiongkok terus melakukan pengendalian terhadap internet melalui amandemen UU tentang Menjaga Rahasia tahun 2010. Hal ini dinilai tidak efektif oleh pemerintah sehingga muncul kebijakan GFW yang lebih efektif dan dinilai berhasil dalam menjaga kedaulatan negara serta mengatasi hegemoni dari media barat

Kata kunci: Kebijakan The Great Firewall of China, Penyensoran Internet, Kedaulatan Siber, Analisis Poliheuristik

Abstract. This article explains the policy of The Great Firewall of China in addressing Western hegemony and the factors that underlie the government's considerations in implementing this policy, which are examined through a polyheuristic analysis. The large number of internet users in China can potentially pose a threat to national security if Western hegemony and ideology infiltrate. Technology and the internet are the main keys in driving the process of globalization. With the existence of the internet, the international community has easy access to expand knowledge, communication, and interaction with people far away. Through the policy of The Great Firewall of China (GFW), the Chinese government controls the internet through censorship. The GFW policy system continues to be strengthened, especially in protecting China's national security in the current digital era. In this study, the author uses Polyheuristic Theory and Digital Protectionism to analyze how the GFW policy is implemented to counter Western media hegemony. The research method used in this study is qualitative, utilizing primary data in the form of literature studies such as articles, theses, online news portals, and books. The research results have shown that since the emergence of the internet in the 1990s, the Chinese government has continuously controlled the internet through the amendment of the Law on Keeping Secrets in 2010. This was deemed ineffective by the government, leading to the emergence of the more effective GFW policy, which is considered successful in maintaining national sovereignty and countering the hegemony of Western media.

Keywords: The Great Firewall of China Policy, Internet Censorship, Cyber Sovereignty, Polyheuristic Analysis

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

The Great Firewall (GFW) adalah sistem penyensoran atau pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Timbulnya kekhawatiran dari fenomena globalisasi yang berdampak pada kemajuan teknologi, terutama pada aspek penggunaan internet, membuat Tiongkok selaku negara komunis membentuk suatu kebijakan demi stabilitas keamanan negaranya dari segala bentuk pemberontakan digital melalui pengaturannya terhadap akses internet masyarakat sehingga Tiongkok dapat dengan mudah mengatur keluar-masuknya informasi asing pada negaranya. Pemblokiran yang dimaksud meliputi situs asing yang menyediakan informasi dan interaksi dengan luar negeri, situs-situs pornografi, dan situs lainnya yang dianggap tidak aman serta menjadi media untuk menyudutkan pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis sehingga berpotensi untuk mengganggu kestabilan negaranya.

Secara politis, pemerintah Tiongkok menganggap internet sebagai platform yang dapat berimplikasi terhadap munculnya protes yang berpotensi merusak stabilitas kekuasaannya, seperti pada peristiwa Tiananmen 1989. Oleh karena itu, kebijakan *The Great Firewall* diterapkan dengan tujuan membatasi akses ke situs-situs asing yang dapat menyebarkan informasi yang mengkritik pemerintah atau menyebarkan ideologi yang tidak sejalan dengan Partai Komunis. Selain kekhawatiran politik dan



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

keamanan, GFW juga digunakan untuk mengendalikan pengaruh budaya asing yang masuk melalui internet, terutama yang dianggap dapat berdampak pada nilai-nilai sosialisme dan kebudayaan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok khawatir bahwa nilai-nilai seperti kebebasan politik dan hak asasi manusia yang diperkenalkan melalui platform global dapat berimplikasi terhadap rusaknya ideologi negara. GFW adalah bagian dari pengawasan sosial yang lebih luas, di mana pemerintah memantau dan mengontrol aktivitas online warganya untuk memastikan kesesuaian dengan norma sosial dan kebijakan negara. Secara keseluruhan, GFW merupakan alat yang tidak hanya digunakan untuk penyensoran, tetapi juga untuk memperkuat kontrol politik, sosial, dan budaya di era digital.

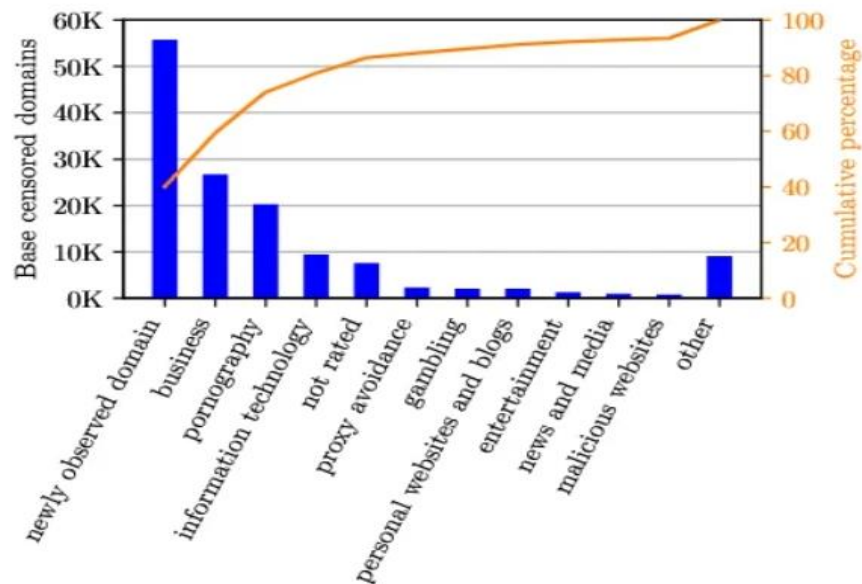
Pada masa awal kemunculan internet, sejumlah media di Tiongkok membuat citra internet sebagai “*Xīnxi gāosù gōnglù*” (信息高速公路) atau “jalan raya informasi” yang akan membuat negara semakin modern. Awal munculnya internet, pada tahun 1998 membuat adanya Penandatanganan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik oleh banyak negara. PBB dan organisasi internasional lainnya menekankan bahwa bebas dari penyensoran dan bebas dari pemblokiran internet adalah bagian dari pelaksanaan kebebasan berekspresi (Moynihan & Patel, 2021). Menurut Xu (2014) konstitusi Tiongkok memberikan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers ke masyarakatnya tetapi tidak adanya peraturan media dan internet secara jelas. Menurut UU tentang Menjaga Rahasia Negara 1988 menjelaskan bahwa rahasia negara adalah hal yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan nasional yang sudah ditentukan oleh prosedur hukum yang dipercayakan kepada sejumlah orang.

Rahasia negara yang dimaksud pada UU tersebut meliputi keputusan kebijakan utama, pertahanan, urusan luar negeri, pembangunan ekonomi dan nasional, IPTEK, keamanan negara dan penyelidikan kriminal. Kemudian, Xu juga menyatakan bahwa amandemen pada UU tersebut di April 2010 bertujuan untuk memperketat kontrol atas arus informasi. Amandemen UU tersebut hanya memperkuat perusahaan internet dan operator telekomunikasi untuk melakukan kerjasama dengan otoritas Tiongkok dalam melakukan penyelidikan kebocoran rahasia negara. Amandemen tersebut tidak memperjelas makna dan klasifikasi tentang rahasia negara serta luasnya informasi yang didapat oleh UU tersebut.

Kebijakan *Great Firewall of China* (GFW) digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk menyensor internet termasuk mengendalikan arus jaringan internasional supaya informasi dari luar maupun dalam

negeri dapat dikontrol dengan mudah. Segala situs asing, informasi berita online yang dianggap tak layak dan menyudutkan pemerintah maupun Partai Komunis secara otomatis akan terblokir (Abdullah, 2021). Penyensoran internet melalui kebijakan GFW ini bertujuan untuk mencapai kepentingan Tiongkok dalam kedaulatan siber dan perkembangan teknologi siber. Hal tersebut dimulai dari tingkat domestik Tiongkok mengingat jika tata kelola internet termasuk salah satu isu strategis di abad ke-21 yang masuk dalam kategori keamanan non-tradisional (Kolton, 2017).

Gambar 1.1 Grafik Data Sensor Internet Tiongkok



Sumber: The Record, 2021

Beberapa konten yang dilarang untuk diakses masyarakat diantaranya yakni: memposting informasi yang dapat menyebabkan pertikaian, pornografi, menyebarkan rahasia negara, kekerasan, konten yang berkaitan dengan judi, pembunuhan, serta konten lainnya yang dapat mengancam keamanan siber (Ahmad, 2022). Pada tahun 2021, peneliti mengungkapkan bahwa Great Firewall China telah memblokir sekitar 311.000 domain, dengan 270.000 pemblokiran berjalan sesuai tujuan, sementara 41.000 domain tampaknya terblokir secara tidak sengaja (The Record, 2021). Beberapa domain yang paling banyak diblokir biasanya menyajikan konten terkait bisnis, diikuti oleh domain yang menyajikan pornografi, dan kemudian domain yang didedikasikan untuk teknologi informasi (TI). Jenis domain yang diblokir lainnya termasuk situs yang menyajikan alat untuk menghindari pemblokiran Great



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Firewall, situs perjudian, blog pribadi, situs hiburan, situs berita dan media, serta domain yang menyajikan konten berbahaya atau *malware*.

Pada masa kepemimpinan Xi Jinping, kebijakan sensor internet ini diperkuat kembali dengan memfokuskan pada inovasi dan tata kelola internet. Xi Jinping juga mendesak beberapa politisi supaya melindungi Partai Komunis Tiongkok (PKT) serta membesarkan pengaruhnya dalam dunia siber internasional supaya posisi Tiongkok tetap kukuh dan menjadi yang paling besar di dunia dalam kekuatan siber (Cai, 2021). Xi Jinping juga menegaskan alasan pemerintah Tiongkok mengendalikan pemanfaatan internet, yakni untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, memperkuat ajakan atau strategi penyampaian informasi kepada masyarakat, serta mengatur opini publik. Pemerintah Tiongkok juga mengandalkan teknologi internet dalam demokratisasi, sehingga kebijakan GFW ini dapat menjadi alat untuk menjaga demokrasi Tiongkok. Sensor internet diharapkan dapat mengendalikan arus informasi yang dapat menyebabkan banyak perbedaan pendapat agar masyarakat Tiongkok tetap terjaga keragamannya. Hal tersebut memungkinkan bagi peningkatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Yahya & Mutia, 2023).

Sebelum adanya kebijakan penyensoran internet melalui kebijakan GFW, Tiongkok sempat menjuluki internet sebagai 'jalan raya informasi' yang dapat membawa Tiongkok menuju era modern. Tiongkok sempat menandatangani Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik pada tahun 1998, yang menandakan bahwa Tiongkok setuju jika masyarakatnya bebas mengakses informasi dan berekspresi dalam dunia siber. Awalnya Tiongkok tak memiliki kebijakan khusus untuk melakukan sensor internet yang mengatur masyarakat dalam mengakses internet. Pada pertengahan 1990-an, hanya ada Undang-Undang yang digunakan untuk membatasi konten internet yang berpotensi membahayakan kedaulatan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Namun, Tiongkok memang sudah memiliki rencana untuk membatasi akses internetnya, dimulai dengan memperumit syarat dan aturan dalam mengakses internet, serta membuat sistem pengawasan supaya pengguna tidak melanggar hukum (Wowor *et al.*, 2023). Namun, sejak internet berkembang pesat di Tiongkok, tepatnya pada era Jiang Zemin tahun 1989 hingga 2002, pengendalian internet melalui langkah-langkah tradisional menjadi kurang efektif (Tilley, 2018).

Kebijakan GFW membuat pemerintah Tiongkok lebih memiliki wewenang untuk menyensor internet dibandingkan sebelum adanya kebijakan ini. Sebelumnya tidak ada aturan jelas tentang seperti apa pengguna internet harus bersikap di dunia maya, tetapi setelah diterapkan kebijakan GFW, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi karena dapat dikenakan pasal dan hukuman. Kebijakan GFW juga menguntungkan bagi Tiongkok karena berdampak positif bagi *e-business* yang dapat mendorong ekonomi. Perusahaan internet di Tiongkok seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent juga berkembang pesat setelah penerapan kebijakan (Yahya & Mutia, 2023). Dalam mempertahankan kebijakan GFW, sejak masa pemerintahan Xi Jinping, kebijakan tersebut semakin ketat diberlakukan. Dapat dilihat dari banyaknya aturan maupun batasan yang mengatur konten di media online. Xi Jinping juga telah menetapkan keamanan siber sebagai prioritas nasional Tiongkok. Dimulai sejak tanggal 1 Juni 2017, Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok mulai diberlakukan oleh Xi Jinping untuk memperkuat kebijakan GFW. UU tersebut berisi pedoman mengakses internet yang berlaku bagi organisasi komersial, lembaga pemerintah, maupun masyarakat Tiongkok (Yahya & Mutia, 2023).

Dengan adanya kebijakan *Great Firewall* pemerintah Tiongkok bisa memiliki kontrol atas komunikasi dan penggunaan internet masyarakat dalam membatasi kebebasan berpendapat. Meskipun dapat dilihat bahwa kebijakan sensor internet yang diberlakukan di Tiongkok bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu transparansi dan akuntabilitas. Terdapat berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah Tiongkok sehingga memilih untuk menerapkan kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang pada paragraf sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait topik ini. Oleh karena itu di rumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut ***“Bagaimana analisis poliheuristik dari kebijakan The Great Firewall of China dalam mengatasi hegemoni barat periode 2020-2023 ?”***

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Pada artikel ini penulis berupaya menganalisis mengenai kebijakan dan praktik sensor internet *“The Great Firewall of China”* menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong dalam Fiantika *et al* (2022), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa menggunakan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

penelitian ini menggunakan studi literatur yang didapatkan dari: artikel, jurnal ilmiah, tesis, media berita online, buku, dan sumber-sumber internet yang terpercaya. Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan penyesuaian terhadap data yang diperoleh melalui *literature review*. Tranfield *et al* (2003) mendefinisikan bahwa *literature review* atau tinjauan pustaka merupakan sebuah metode mengumpulkan dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya secara sistematis dengan tujuan memberikan informasi atau gambaran tentang topik penelitian yang sedang dilakukan. Data-data yang telah didapat, selanjutnya dibandingkan dan direduksi untuk memperoleh data yang sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini.

2.2. Teori Penelitian

2.2.1. Teori Proteksionisme Digital

Pada mulanya, teori Proteksionisme hanya berfokus pada bidang ekonomi. Kemunculannya pun merupakan bentuk penolakan terhadap Liberalisme Pasar Bebas. Friedrich List (1841) melalui bukunya yang berjudul “The National System of Political Economy” mengatakan bahwasanya negara seharusnya melindungi dan memperkuat kekuatan produktivitas dalam negeri dengan melakukan pengembangan industri. Tugas utama negara adalah menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Jadi, Teori Proteksionisme berbicara mengenai upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi hak-hak masyarakatnya, meningkatkan kekuatan nasionalnya, serta meminimalisasi pengaruh dari luar negara.

Kemudian, pada awal abad ke-21 muncul istilah baru dalam Teori Proteksionisme, yaitu Proteksionisme Digital. Teori Proteksionisme yang dulunya hanya berbicara mengenai aspek ekonomi kini telah merambah ke ranah digital. Teori Proteksionisme Digital mencoba menjelaskan peran negara dalam melindungi kekuatan digital domestik dengan melemahkan pesaing digital asing serta memperkuat perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang digital. Mekanisme pelaksanaan Proteksi Digital ini beragam bentuknya, mulai dari pembuatan undang-undang keamanan siber yang lebih menguntungkan bagi perusahaan digital domestik, penyensoran web, hingga transfer teknologi secara paksa (CFR, 2017).

2.2.2. Teori Poliheuristik

Alex Mintz (1997) mendefinisikan teori Poliheuristik sebagai suatu cara untuk menganalisis kebijakan luar negeri dengan menggabungkan pendekatan kognitif dan rasional dalam pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan. Teori ini terdiri dari dua tahap proses pengambilan keputusan. Teori poliheuristik membahas "mengapa" dan "bagaimana" dalam pengambilan suatu keputusan. Fokus dari teori ini adalah pada bagaimana para pengambil keputusan menggunakan heuristik dalam perjalanan menuju pilihan dengan membahas proses dan pilihan yang terkait dengan tugas pengambilan keputusan. Teori ini mengemukakan dua pernyataan. Pertama, individu menggunakan campuran berbagai strategi pengambilan keputusan dalam perjalanan menuju satu pilihan. Secara khusus, para pengambil keputusan menggunakan proses pengambilan keputusan dua tahap, di mana pada tahap pertama, mereka menggunakan kognitif, kemudian pada tahap kedua, para pengambil kebijakan cenderung menggunakan strategi yang lebih rasional dan memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Teori poliheuristik juga menekankan aspek politik pada pengambilan kebijakan dalam konteks kebijakan luar negeri dengan mengukur biaya dan manfaat, risiko dan imbalan, keuntungan dan kerugian, serta keberhasilan dan kegagalan yang dilandaskan pada berdasarkan pertimbangan politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan *The Great Firewall of China* dalam Analisis Poliheuristik

Berikut ini merupakan tabel pilihan alternatif dimensi-dimensi poliheuristik, yaitu dimensi politik, ekonomi, dan keamanan yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dua pilihan alternatif.

Tabel 1. Pilihan Alternatif Kebijakan *The Great Firewall of China* (GFW)

Kode	Kebijakan	Komponen
------	-----------	----------



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

A1	Tiongkok tidak menjalankan kebijakan <i>The Great Firewall of China</i> (GFW)	1. Kebebasan berbicara masyarakat Tiongkok, terutama dalam isu sosial dan politik yang selama ini disensor 2. Kurangnya lapisan Pertahanan <i>Cyber Security</i>, sebab Tiongkok sudah menerapkan digitalisasi dalam keseharian 3. Mendorong Hubungan Internasional Tiongkok dan kerja sama dalam bidang teknologi komunikasi terbuka lebar 4. Kondisi ekonomi digital yang mengalami pergeseran dengan bersaingnya perusahaan asing di pasar Tiongkok.
A2	Tiongkok menjalankan kebijakan <i>The Great Firewall of China</i> (GFW)	1. Memaksimalkan stabilitas politik dan demokrasi negara dengan mengontrol aliran informasi 2. Mendorong kemajuan ekonomi dan inovasi sektor teknologi dan informasi dalam negeri 3. Memperkuat ketahanan siber Tiongkok serta menghalau pengaruh dominasi asing 4. Mendorong ekspor teknologi ke negara demokrasi liberal

Tabel 2. Dimensi yang Mempengaruhi Kebijakan

Kode	Dimensi	Kriteria Evaluasi
B1	Politik	Apakah kebijakan A1/A2 memperkuat dominasi pemerintah Tiongkok?

B2	Ekonomi	Apakah kebijakan yang diputuskan A1/A2 akan membantu dalam perkembangan ekonomi Tiongkok ke depannya?
B3	Keamanan	Apakah kebijakan A1/A2 dapat mencegah ancaman dari luar dan melindungi stabilitas Tiongkok?

Tabel 3. Aplikasi Matriks Kebijakan Poliheuristik

Dimensi/Alternatif	A1 Tiongkok tidak menjalankan kebijakan <i>The Great Firewall of</i> <i>China</i> (GFW)	A2 Tiongkok menjalankan kebijakan <i>The Great Firewall of China</i> (GFW)
Dimensi Politik (B1)	1. Rakyat lebih bebas dalam berekspresi dan mengakses media informasi 2. Adanya kecenderungan pengaruh ideologi barat yang meluas di Tiongkok 3. Adanya potensi intervensi politik dari luar	1. GFW memberikan jaminan stabilitas politik, terutama memperkuat kekuasaan Partai Komunis Tiongkok 2. GFW melindungi persebaran ekstrimisme politik dan ideologi yang mengancam Pemerintahan Tiongkok. 3. Kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat tentang ideologi terbatas



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Dimensi Ekonomi (B2)	1. Kebijakan ekonomi akan berubah mengikuti persaingan secara Internasional, karena perusahaan asing akan masuk ke pasar lokal, perubahan tersebut dapat berupa standarisasi industri, perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai upaya mengontrol kompetisi pasar 2. Perusahaan terkhususnya perusahaan teknologi dapat dengan efektif memasarkan produk di pasar global dan perluas jangkauan 3. Hubungan dagang dengan Barat mengalami perbaikan sehingga banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Tiongkok	1. GFW memberikan manfaat positif bagi <i>e-business</i> yang berkembang pesat setelah penerapan kebijakan 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan mengutamakan penggunaan teknologi dalam negeri 3. Mempengaruhi hubungan ekonomi Internasional Tiongkok terutama dengan negara barat
-------------------------	---	---

Dimensi Keamanan (B3)	1. Tidak ada kebijakan khusus yang mengatur masyarakat dalam menggunakan internet selain Undang-Undang dan langkah tradisional. Oleh sebab itu, dapat lebih rentan terhadap serangan siber 2. Meningkatnya aktivisme dan gerakan protes akibat diterapkannya kebijakan GFW yang membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mau tidak mau harus tunduk dengan pemerintah pusat 3. Mengganggu stabilitas di Tiongkok terhadap ketidakpuasan pemerintah, terutama bagi masyarakat Tiongkok yang pro-Barat dan negara lain	1. Komitmen terhadap keamanan siber sebagai prioritas nasional Tiongkok 2. GFW memperkuat ketahanan siber negara melalui upaya penyensoran internet dan pembatasan terhadap akses media informasi terutama yang berasal dari barat 3. Adanya tantangan berupa masih ada celah melalui VPN
--------------------------	---	---

Tabel 4. Kalkulasi Matriks Kebijakan

Kode	Dimensi	Dasar Pertimbangan	Bobot Nilai A1	Bobot Nilai A2
B1	Politik	Apakah kebijakan A1/A2 menegaskan dominasi pemerintah Tiongkok?	-1	1



B2	Ekonomi	Apakah kebijakan yang diputuskan A1/A2 akan membantu dalam perkembangan ekonomi Tiongkok ke depannya?	1	1
B3	Keamanan	Apakah kebijakan A1/A2 dapat mencegah ancaman dari luar dan melindungi stabilitas Tiongkok?	-1	1
TOTAL			-1	3

Berdasarkan penjabaran analisis poliheuristik dari kebijakan GFW pada tabel diatas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut oleh pemerintah Tiongkok, yakni dimensi politik (B1), ekonomi (B2), dan keamanan (B3). Pada tabel 4 didapati hasil analisis bahwa dijalankannya kebijakan GFW (A2) memiliki dampak terhadap dimensi politik (B1) dalam memperkuat dominasi pemerintah Tiongkok. Kebijakan GFW memberikan jaminan dalam menstabilkan politik terutama memperkuat kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Selain itu, GFW juga dapat mengontrol aliran informasi yang diterima oleh warga negara Tiongkok sehingga persebaran ekstrimisme politik maupun ideologi yang dapat mengancam pemerintah dapat dicegah. Selanjutnya pada bagian dimensi ekonomi (B2), bobot nilai A1 maupun A2 sama-sama memberikan manfaat terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok di masa depan. Jika Tiongkok tidak menjalankan GFW (A1), maka perusahaan di Tiongkok dapat lebih mudah dalam memasarkan produk ke dalam pasar global, serta dapat meningkatkan investasi asing yang masuk karena terbukanya hubungan dagang Tiongkok dengan negara Barat. Sementara apabila Tiongkok menjalankan kebijakan GFW (A2), maka didapati manfaat ekonomi berupa perkembangan *e-business* dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi-inovasi teknologi dalam negeri. Pada dimensi keamanan (B3), diterapkannya kebijakan GFW dapat memenuhi dasar pertimbangan dalam mencegah ancaman dari luar dan menjaga stabilitas negara melalui komitmen Tiongkok pada keamanan siber dan menjadikan keamanan siber sebagai prioritas apabila kebijakan GFW diberlakukan. Berdasarkan hasil analisis poliheuristik tersebut

didapati total bobot nilai A2 lebih tinggi dibandingkan total bobot nilai A1, sehingga hasil akhirnya Tiongkok menjalankan kebijakan GFW (A2).

3.2 Implementasi Kebijakan *The Great Firewall of China*

Kebijakan *Great Firewall of China* adalah kebijakan pembatasan akses warga negara Tiongkok terhadap informasi dari luar negeri yang diresmikan pada masa kepemimpinan Xi Jinping dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik Tiongkok. Hal yang dapat dilihat secara jelas adalah terdapat inkonsistensi dari gaya kepemimpinan Xi Jinping. Sebelumnya, Tiongkok telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa haruslah ada kebebasan akses informasi dan kebebasan berekspresi, dunia digital harus penyensoran, termasuk bebas dari pemblokiran atau penyaringan internet, adalah inti dari pelaksanaan kebebasan dalam berekspresi. Namun, dalam implementasinya Tiongkok telah melanggar perjanjian tersebut dengan memberlakukan kebijakan *Great Firewall of China*. Pemerintah Tiongkok telah melakukan pelanggaran hak dan kebebasan masyarakat Tiongkok untuk mengakses informasi di internet yang secara jelas tertulis dalam konstitusi Tiongkok.

Pembatasan internet di Tiongkok telah dilakukan sejak tahun 1997, lalu tiga tahun setelah masyarakat Tiongkok akhirnya dapat mempunyai akses internet, Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang untuk menyensor yang berupa pelarangan bagi masyarakat Tiongkok untuk melakukan aktivitas di internet yang menimbulkan pengaruh bagi keamanan jaringan negara, menyebarkan pornografi, menyebarkan rahasia negara apapun, menyebarkan konten yang berbahaya seperti pembunuhan, kekerasan, perjudian, dan menyebarkan informasi yang menciptakan perlawanan (Ahmad, 2022).

Proyek *The Great Firewall of China* sendiri muncul setahun kemudian dibarengi oleh penjelasan jika internet merupakan aspek penting bagi kedaulatan negara dan karenanya internet harus benar-benar diatur oleh negara. Penyensoran *The Great Firewall of China* ini merupakan instrumen yang paling penting bagi Partai Komunis Tiongkok karena proyek ini telah ada sejak 1980, dan pertama kali diresmikan pada tahun 1998 oleh Partai yang berkuasa pada saat itu yang berfokus ke pembangunan jaringan telekomunikasi tingkat dasar/pertama, kedua, ketiga, dan sampai pada data aplikasi. Selanjutnya tahap dua pada 2006 Penerapan dari *The Great Firewall of China* dilakukan guna memantau aktivitas masyarakat di internet serta menindaklanjuti para pelanggar (Ahmad, 2022). Pada tahap dua, proyek ini memiliki fokus pada upaya meningkatkan aplikasi, integrasi sistem yang semakin baik, memperluas sistem informasi, hingga meningkatkan perluasan sarana informasi di provinsi-provinsi bagian barat dan tengah Tiongkok (Yahya &



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Mutia, 2023). Implementasi dari *The Great Firewall of China* ditangani oleh Pusat Koordinasi Tim Teknis Tanggap Darurat Jaringan Komputer Nasional yang berada langsung dibawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Tiongkok, serta dirancang langsung oleh Fang Binxing selaku Presiden dan Profesor Universitas Pos dan Teknologi Beijing

Dalam pengoperasian aturan *The Great Firewall*, semua itu terpaku pada konsep *Packet Filtering*, *Complete Content Inspection*, *Stateful Inspection*, dan *Application Proxy* yang semua itu berada dibalik *Firewall* (Yahya & Mutia, 2023). Berikutnya Tiongkok memiliki 5 metode dalam penerapannya: Pertama, mereka memblokir *Uniform Resource Locators (URL)* dan bisa dikatakan jika metode ini merupakan yang paling efektif karena pemindaian kata kunci tertentu yang sudah didaftarkan dalam kata terlarang akan langsung terblokir sehingga masyarakat tidak bisa membukanya. Kedua mereka mengecoh kode domain tertentu yang biasa disebut *Domain Name System (DNS)*, sistem akan mengecoh IP pengguna jika mereka mengetik sesuatu dalam mesin pencari dan jika yang dicari merupakan kata yang dilarang akan langsung terpental akibat dipantau langsung oleh Firewall. Selanjutnya yang ketiga pemblokiran *Virtual Private Network (VPN)*, sebenarnya penggunaan VPN tidak terlalu ketat di Tiongkok jika pemilik perusahaan VPN yang ada melaporkan data pengguna dari VPN tersebut, Namun mereka sangat melarang penggunaan VPN ilegal dan aktivitas dari pengguna ilegal tersebut akan ditelusuri siapa, asalnya, serta aktivitasnya oleh *Firewall*. Keempat adalah *Man-in-the-Middle-Attacks* atau MITMA, biasanya dalam pengoperasian sebuah situs web, data yang dikirim akan menggunakan sebuah sertifikat SSL agar bisa terenkripsi, Metode ini sangat memberikan peluang bagi pemerintah Tiongkok dalam meniru sertifikat menjadi buatan mereka sendiri dalam mengawasi, menyadap, hingga mengumpulkan data yang ada di internet, termasuk penggunaanya. Serta yang kelima adalah *Probing Active*, yaitu melakukan pendeteksian dan memblokir server yang terdeteksi menggunakan teknik *shadowsocks* atau penghindaran dari penyensoran. metode ini merupakan cara Pemerintah Tiongkok menahan adanya perbedaan pandangan politik, menciptakan narasi yang mengarah pada pro-pemerintah, dan berupaya agar membatasi akses masyarakat terhadap konten yang bertentangan dengan pemerintahan Tiongkok (Zulfikar, 2023).

Pemblokiran WEB yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam hal ini dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya; media sosial yang berasal dari Barat (*Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Blogspot*, *Line*, dan *Wordpress*), mesin pencari (*Google* dan *Yahoo*) berita asing (*NYtimes*, *CNN*, *BBC*, *Dailymotion*,

Vimeo, dan Bloomberg), Situs yang menyediakan berbagi file (*slideshare.net*), portal Tiongkok yang berasal dari luar negeri dan digunakan sebagai forum diskusi (*6park.com* dan *uwants.com*), hingga situs yang menyediakan pornografi (*lilac adult community*, *free strongly-emotional films*, *naked chat bar*, *adultism*, dan situs pornografi lainnya), dan perjudian (*9522Bet*, *casinolasvegas.com*, *partycasino.com*, dan *prestige casino*). Faktanya, Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) mengumumkan telah menutup sebanyak 14.624 situs website ilegal, menghapus 259 aplikasi, serta menutup 127.878 akun di platform media sosial pada tahun 2023 (Junqing, 2024). Namun, sebagai gantinya, pemerintah memberikan kesempatan kepada para perusahaan Internet di Tiongkok untuk membuat media sosial yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat dengan syarat mereka harus patuh dan mengikuti peraturan sensor yang telah ditetapkan pemerintah, maka dari itu muncul banyak sosial media yang tercipta dan banyak digunakan oleh masyarakat Tiongkok, yakni *Weibo*, *Baidu*, *QQ*, *Wechat*, hingga *Youku*. Sampai pada tahun 2023, Peraturan *The Great Firewall of China* semakin kuat karena diresmikannya undang-undang keamanan siber yang setelahnya akan dibuat sebagai pedoman bagi organisasi komersial, pedoman wajib masyarakat Tiongkok dalam mengakses internet hingga lembaga pemerintah. Dengan diresmikannya undang-undang ini, Tiongkok berharap jika tata kelola ruang siber mereka dan perlindungan keamanan penggunaannya akan semakin kuat.

Di dunia internasional, Pemerintah Tiongkok juga semakin menggiatkan pembangunan “Jalur Sutra Digital” yang mana banyak perusahaan Tiongkok yang melakukan investasi atas proyek kabel optik lintas batas yang ditempatkan di bawah laut antar benua, serta spasial (satelit). Investasi lainnya juga dilakukan secara besar-besaran untuk perangkat keras dan *e-commerce* dan *financial technology* (Fintech). The Mercator Institute melaporkan bahwa dengan investasi-investasi tersebut, Tiongkok berhasil menghasilkan bentuk pinjaman dan investasi kabel sebanyak 7 miliar dollar Amerika Serikat serta lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat dalam berinvestasi *e-commerce* dan sistem pembayaran online (Yahya & Mutia, 2023).

Kebijakan *Great Firewall of China* memberikan pengaruh signifikan terhadap keamanan data dan jenis konten yang beredar di dunia maya. GFW mengawasi semua hal yang ada di internet, baik yang berada di kawasan Tiongkok maupun dari luar Tiongkok, sehingga hasil pemantauan diteruskan ke pihak Kepolisian Tiongkok untuk dipelajari dan dianalisis, selanjutnya mengembangkan hasil temuan dengan membandingkan konten-konten dengan kata kunci yang telah disusun untuk memastikan keamanannya. Apabila ditemukan data dan konten yang berunsur ancaman dan jebakan, maka pihak berwajib akan menindaklanjuti orang di balik pembuatan dan penyebaran konten tersebut. Kebijakan ini juga memberikan dampak ketat terhadap pemberian pengaruh negatif ke masyarakat Tiongkok dan mengurangi ancaman-ancaman dari luar sehingga pemerintah dapat berfokus ke masalah yang ada di dalam negeri. Upaya



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

pemerintah Tiongkok dalam memberlakukan GFW sekaligus membantu dalam menjalankan *cyber security* yang memerlukan jaringan yang aman dan terpercaya bagi proses pertukaran informasi yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Tiongkok, namun tetap mendahului buatan dalam negeri, yaitu Wechat, Douyin, Baidu, Alipay, Weibo, dan lainnya sekaligus membatasi akses buatan luar negeri, seperti Google, Facebook, Youtube, Instagram, dan situs lainnya (Wowor *et al.*, 2023).

Kebijakan ini turut berimplikasi bagi perusahaan-perusahaan asing yang sering menghadapi hambatan dalam perizinan untuk menyediakan layanan jaringan di pasar Tiongkok. Salah satu perusahaan multinasional milik Amerika Serikat, Google yang mengalami ratusan ribu domain disensor hingga dibatasi dan diblokir aksesnya. Pada akhirnya memutuskan hasil yang keras, di mana Google keluar dari Tiongkok. Sayangnya, beberapa masyarakat Tiongkok masih tidak terbiasa dengan fitur di aplikasi buatan negerinya sendiri, bahkan mereka menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) untuk tetap mengakses internet dan aplikasi yang diblokir (Wang, 2019). Dilansir Voice of America, penggunaan VPN di Tiongkok meningkat tajam sebesar dua kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Steele, 2024). Hal ini dilandaskan pada keinginan masyarakat Tiongkok untuk tetap bisa menjangkau aplikasi dan situs yang diblokir sehingga memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat mereka secara bebas. Penggunaan VPN tidak dilarang sepenuhnya, namun dibatasi dan hanya diperbolehkan menggunakan VPN yang sudah disetujui oleh pemerintah. Pihak yang melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan hukuman penjara atau denda.

3.3 Peluang dan Tantangan Kebijakan *The Great Firewall of China*

Kebijakan Great Firewall of China ini nyatanya memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kebijakan ini dinilai tidak sepenuhnya efektif dalam membatasi akses informasi ke dan dari luar negeri. Banyak masyarakat Tiongkok yang menggunakan VPN untuk dapat mengakses situs yang diblokir. Selain itu, Sistem pemeriksaan yang bersifat manual juga perlu ditingkatkan agar lebih akurat, karena dengan masih adanya diskusi politik di Tiongkok tersebut menunjukkan bahwa GFW tidak langsung memblokir konten politik, tetapi menyaringnya terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada pihak berwajib untuk diputuskan. Selain itu, pembatasan akses ini mempersulit para pemimpin bisnis untuk berkomunikasi dengan dunia luar melalui platform media sosial barat yang mainstream, sebuah kondisi

yang dianggap kurang ideal bagi perusahaan kecil yang masih bergantung pada komunitas online.

Di sisi lain, GFW telah memberikan peluang bagi pemerintah Tiongkok untuk fokus pada pengembangan ekonomi digital dengan mengandalkan terobosan baru seperti Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat mempermudah aliran modal dan tenaga kerja. Dalam konteks kemampuan militer, GFW berfungsi sebagai bagian dari strategi Tiongkok dalam menguatkan cybersecurity dan mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi perang di dunia maya, khususnya dengan Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan platform alternatif yang dikembangkan oleh perusahaan lokal Tiongkok memberikan peluang untuk kontrol sosial yang lebih efektif.

4. KESIMPULAN

Kebijakan *The Great Firewall of China* (GFW) menjadi sebuah langkah yang strategis untuk mengendalikan arus informasi dan menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri Tiongkok. Melalui kebijakan penyensoran internet ini, pemerintah Tiongkok bertujuan untuk membatasi akses warganya terhadap informasi yang dianggap dapat mengganggu ideologi dan kebijakan pemerintah, terutama yang berasal dari media Barat. Meskipun menyebabkan kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi global menjadi terbatas, GFW telah berdampak baik dalam menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan Tiongkok dan menghasilkan industri domestik yang kian berkembang pesat.

Dari perspektif Poliheuristik, penerapan GFW oleh Tiongkok bisa dipandang sebagai keputusan rasional yang mengutamakan stabilitas politik ekonomi, dan keamanan meski dengan mengorbankan pluralitas informasi. Pada sisi lain, GFW menawarkan peluang bagi industri teknologi di Tiongkok untuk berkembang, namun juga menghadirkan tantangan besar seperti tidak sepenuhnya efektif dalam membatasi akses informasi hingga potensi respons negatif dari masyarakat Tiongkok dan perusahaan asing yang melihat kebijakan ini sebagai pembatasan kebebasan global. Namun, secara keseluruhan GFW telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuannya dengan melakukan penyensoran internet dan mengatasi hegemoni media barat di era digitalisasi ini karena dengan adanya kebijakan GFW, pemerintah bisa menyaring dan memantau internet di Tiongkok serta merancang aturan hukum



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

mengenai konten internet yang dianggap berbahaya agar dapat menjaga kedaulatan Tiongkok dan mengatasi hegemoni dari media barat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, D. (2021). *"Great Firewall", Upaya Cina Ciptakan Jagat Internetnya Sendiri*. Kompasiana.com.

<https://www.kompasiana.com/kitarakyatjelata/606b04f18ede480d9e0fb642/great-firewall-upaya-cina-ciptakan-jagat-internetnya-sendiri?page=all#section2>

Ahmad, K. (2022,). *What Is the Great Firewall of China and How Does It Work?* MakeUseOf. Retrieved November 18, 2024, from <https://www.makeuseof.com/what-is-great-firewall-china/>

Cai, J. (2021, March 14). China's internet was hailed as a path to democracy but the Communist Party reshaped it in its own image. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3125128/chinas-internet-was-hailed-path-democracy-communist-party>

Council on Foreign Relations (CFR). (2017). The Rise of Digital Protectionism. Insight from a CFR Workshop. Diakses dari <https://www.cfr.org/report/rise-digital-protectionism> pada 22 November 2024.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti Leli, Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif

- Hakman, I., Mintz, A., & Redd, S. (2021). Teori Poliheuristik Pengambilan Keputusan Krisis dan Analisis Keputusan Terapan. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Diakses tanggal 7 November 2024, dari <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1524>
- Junqing, M. (2024). China Terminates 14,624 Illegal Websites in 2023. Xinhuanet. com. <https://english.news.cn/20240131/84cd9066a067440e88b5624bafa86fd6/c.html>
- Kolton, M. (2017). Interpreting China's Pursuit of Cyber Sovereignty and its Views on Cyber Deterrence. *The Cyber Defense Review*, 2(1), 119–154. https://www.jstor.org/stable/26267405?seq=1&cid=pdfreference#%0Areferences_tab_contents
- Mintz, A. & Geva, N. (1997). The Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decisionmaking. In: Decisionmaking on War and Peace: The Cognitive-rational Debate. s.l.:Lynne Rienner Publishers.
- Redd, S. B. (2023). Key Concepts in the Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision Making: A Comparative Examination Using Systemist Theory. *Social Sciences* 12: 446. <https://doi.org/10.3390/socsci12080446>.
- Rusnandi, R. (2022). Restrictions on Freedom of Expression Under Chinese President Xi Jinping in the Globalization Era. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 81-9
- Steele, E. (2024). China's VPN Usage Nearly Doubles Amid Internet Censorship. Voice of America. <https://www.voanews.com/a/china-s-vpn-usage-nearly-doubles-amid-internet-censorship/7488465.html>
- Tilley, M. L. (2018). The Great Firewall of China: Implications of Internet Control for China Post-Tiananmen Square Massacre to Present Day. *Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH)*. <https://dash.harvard.edu/handle/1/37945137>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Wowor, H. G. A., Sudirman, A., & Hakiki, F. (2023). China's Great Firewall: Cybersecurity as Strategy for Building World Cyberpower. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 193-232. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/27713/10587>

Xie, Z. (2024). China's Great Firewall is blocking around 311K domains, 41K by accident. The Record. <https://therecord.media/chinas-great-firewall-is-blocking-around-311k-domains-41k-by-accident>

Yahya, F. A., & Mutia, R. T. N. (2023). THE GREAT FIREWALL OF CHINA: PRAKTIK KEBIJAKAN SENSOR INTERNET PADA ERA XI JINPING (2014-2021). *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 6(1), 13-24. <https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50007>

Zulfikar, F. M. (2023). PEMBATAKAN AKSES INTERNET SEBAGAI UPAYA CHINA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL: THE GREAT FIREWALL OF CHINA. *Journal of Global Studies*, 1(1), 26-38. file:///C:/Users/user/Downloads/BHUVANA